

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*. Revisi. Surabaya: Prenadamedia Group, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hans Kalsen. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa media, 2007.
- Edi Soeharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refrika Aditama, 2005.
- Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemrintahan Yang Baik)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Wardani, Ach. Khiarul Waro, Hutrin Kamil, and Moch Choirul Rizal. “Diktat Pengantar Ilmu Hukum,” , 2021.
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992
- Delly Maulana dkk. *Disrupsi Keilmuan Sosial Era Digital Perspektif Administrasi Negara, Komunikasi, Dan Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.
- Hariadi Kartodihardjo. *Percikan Pemikiran Tentang Tata Kelola Kebijakan Serta Politik Kehutanan Dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Forest Digest, 2021.
- Itsna Hidayatul Khusna, dan Nuning Susilowati. “Regulasi Media Di Indonesia (Kajian Pada Keterbukaan Informasi Publik Dan Penyiaran).” *Promedia 1* (2015)
- J.H.A. Logemann. *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif Terjemahan Makatutu Dan Pengkerego*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1975.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Mahfud MD. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Yogyakarta: Luberty, 1993.
- Nelvitia Purba,Mukidi, Sri Rizki Hayaty. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*.

Banten: CV.AA RIZKY, 2022.

Ni'matul Huda. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, 2015.

Sajipto, Rahadjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Edited by FH Unika Parahyangan. Bandung, 2010.

Suharto, Edi. Analisis Stabilitas Politik Dalam Pembangunan Desa. Jakarta: Pusat Kajian Desa, 2023

Fienso Suharsono. Kamus Hukum. Bukit Menteng: Vandetta Publishing, 2010.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5495)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Nomor 92/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Pasal 118 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Permohonan Perkara Nomor 107/PUU-XXIII/2024 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XXIII/2025 Tentang Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Jurnal

Pelu, Aldy, Jusuf Madubun, and Marno Wance. Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*. Vol. 2. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mattaram, 2023. <https://doi.org/10.30598/jgssvol2issue2page124-139>. Hal. 124-139.

Rini Anggaraeni, Sukimin A, Heru Nuswanto. “Analisis Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.” *Semarang Law Review* 5, No. 1 (2024): Hal. 71-79.

Saraswati, Retno. “Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan.” *Ius Constituendum* 43.3 (2014) Hal. 315.

Suleman, A R R, E I Rahim, and N Achir. “Formulasi Ideal Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia.” *Journal Of Social Science* 3, no. 6 (2023): Hal. 3. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6892><http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6892/5103>.

Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha. “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 11 (2017): Hal. 1-15.

Yunda Santika, Sukanto Satoso, Netty. “Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Desa Tabun Kecamatan Vii Koto Kabupaten Tebo.” *Journal of Administration Law Mendapo* 1 (2020) Hal.121–22. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

- Amran H Rekson, dkk. "Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan (Studi Di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana)." *Jurnal Neo Societal* 3, No. 2 (2018): Hal. 262.
- Dewi Rahma Shobirin, dkk. "Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan Ruu Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa." *Jurnal Media Akademik* 2, No. 4 (2024): Hal. 3031–5220.
- Rianto Z.W Abidjulu dkk. "Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkelanjutan : Sebuah Studi Literatur Kasus-Kasus Di Indonesia Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa Yang Kompeten Dalam" 2, No. 2 (2024): Hal. 3–4.
- Sandy Mulia Ardhan. "Problematisa Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi." *Ilmu Hukum* 19 (2023): Hal. 171.
- Etik Takririah. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2015 Dalam Prespektip Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)." *Iain Smh Banten*, 2016, Hal. 27.
- Fathurrahman, Muhammd. "Urgensi Dan Implikasi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Dinamika Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Case Law Journal of Law* 5, No. 1 (2024).
- Riza Multazam Luthfy. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," No. 4 (2019): Hal. 323.
- Frans Bapa Tokandan Urbanus Ola. "Dinamika Politik Desa Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkadaes." *Jurnal Unwira* 1, No. 1 (2020): Hal. 2.
- Kadek Cahya Susila Wibawa. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, No. 3 (2019): Hal. 401–3. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>.
- Maslul, Syaifullahil. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021." *Jurnal Literasi Hukum* 6 (2022): Hal 131–40.
- Mohamad Rifan dan Liavita Rahmawati. "Konstitusi Desa Dan Eksistensinya Dalam Regulasi Di Indonesia *The Village Constitution and Its*" 18 (2021): Hal 39–40.
- Sherly Danti Suharmartha, Syamsir, Eriton. "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, No. 2 (2023): Hal. 238. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>.
- Umbu TW Pariangu, La Ode Muhammad Elwan. "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa" 6, No.

3 (2023): Hal. 853.

Rajab, Achmadudin. “Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun Menjadi 9 Tahun: Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Dan Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Budget Isu Dan Masalah Keuangan Negara* Vol 8, No. 2 (2023): Hal. 204.

Netty, Irwandi dan Ratna Dewi. “Implementasi Penataan Administrasi Desa Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021): Hal 798–99. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15787>.

Fitria, Syamsir, Latifah Amir, dkk. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Memperkuat Perekonomian Desa.” *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum* 1 (2024): Hal 101-102

Trubus.Rahadiansyah, “Dampak Politik Hukum Pada Reformasi Desa.” *Jurnal Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2023): Hal. 33-35.

Sri Soemantri,. “Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 3 6 (1996): Hal. 1–6.

Zulkarnain Ridlwan. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (2013): Hal. 63.

D. Skripsi

Desta Angga Ramadani, Anshorullah, Adeb Davega Prasna. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”, (2024): Hal. 340–48.

Lintang Ayu Taufiqqoh. “Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” 2025, Hal. 85–87.

Agung Wahyu Rahmattullah. “Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam Konteks Fiqh Siyash,” 2024, Hal 20–21.

E. Website

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. “Dana Pilkades Di Tulungagung Rp 15 M Dikembalikan Ke Kas Daerah.” n.d. <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Caber-pilkades.pdf>.

Indonesia Corruption Watch. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.” *Antikorupsi.Org*, May 2024. [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan)

Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.pdf.

Kode Pos. “Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan,” n.d.
https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=kode-wilayah#:~:text=Berdasarkan Permendagri terbaru tersebut%2C saat ini di,Indonesia terdapat 91.592 kode wilayah administrasi pemerintahan.

“Pengen Jadi Kepala Desa ? Cari Tahu Dulu Tugas Pokok Dan Fungsinya,” n.d.
<http://bumiayu.desa.id/kabardetail/VGNKcTcySkd6RnFGQnpjbGRPam1YUT09/pengen-jadi-kepala-desa---cari-tahu-dulu-tugas-pokok-dan-fungsinya.html>.

PSHK. “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik.” *Pshk.or.Id*, 2023.
<https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-kebobrokan-etik->.

Fitriani Ahlan Sjarif. “Belajar Ilmu Perundang-Undangan Itu Penting, Ini Alasannya,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/belajar-ilmu-perundang-undangan-lt638d3e536756c/>.